

**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA  
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)  
DI KELURAHAN KURAO PAGANG KOTA PADANG**

Asdaliani<sup>1</sup>, Nora Eka Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

INFORMASI ARTIKEL	A B S T R A K
<p>Diterima: 17 Mei 2019 Direvisi: 18 Mei 2019 Diterbitkan: 20 Mei 2019</p>	<p><i>Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan khususnya di RW 08 Kelurahan Kurao Pagang. Selanjutnya pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik sampling insidental dan sampling purposive. Berdasarkan teknik sampling insidental yaitu beberapa warga binaan yang terdapat pada 75 KK yang peneliti temui secara kebetulan ada di lapangan penelitian, sedangkan pada sampling purposive yaitu pada pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada pelaksanaan Program P2WKSS. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian yang peneliti dapat di lapangan tentang Program P2WKSS yaitu tentang pelaksanaan Program P2WKSS. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang sudah membawa perbaikan bagi daerah namun belum membawa peningkatan pendapatan warga binaan sebagaimana tujuannya.</i></p>
<p><b>KATA KUNCI</b></p> <p>Pelaksanaan, Program P2WKSS, Warga Binaan</p>	
<p><b>KORESPONDEN</b></p> <p>No. Telepon: <b>+682389703320</b> E-mail : <a href="mailto:asdaliani14@gmail.com">asdaliani14@gmail.com</a> <a href="mailto:noraekaputri@fis.unp.ac.id">noraekaputri@fis.unp.ac.id</a></p>	

**PENDAHULUAN**

Persoalan kemiskinan selalu menyertai proses pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi problem besar yang harus diselesaikan. Salah satu usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan ini dapat dilakukan melalui pembangunan nasional bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional tersebut

merupakan serangkaian proses perubahan yang dilakukan pemerintah bersama seluruh warga atau masyarakat dengan mengharapkan terwujudnya masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan nasional yang dimaksud mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu cara pemerintah tersebut yaitu dengan melakukan pemberdayaan perempuan (Utama & Handayani, 2017).

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kedudukan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dimulai dari lingkungan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai penggerak.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Daerah telah menjelaskan bahwa sasaran dari Program P2WKSS yaitu keluarga miskin di desa/kelurahan dengan perempuan sebagai penggerak utama. Sedangkan pelaksanaan P2WKSS bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Eva Mustika Rosa SE, MM sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi pada 27 Desember 2018 di Dinas DP3AP2KB Kota Padang. Beliau menjelaskan bahwa implementasi Program P2WKSS dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang yang sudah ada sejak tahun 2008. Program ini sudah diterapkan di kelurahan-kelurahan yang dipergilirkan yang hanya berlaku 1 tahun namun pada Kelurahan Kurao Pagang secara istimewa mendapat pembinaan lanjutan sampai 3 tahun. Hal ini ditetapkan karena 1 tahun penerapan program dirasa kurang maksimal. Kelurahan Kurao Pagang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Nanggalo. Implementasi Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang sudah diterapkan sejak Januari 2017, tepatnya di RT 01 dan RT 02 RW 08. Pemilihan Kelurahan Kurao Pagang sebagai daerah pembinaan keluarga melalui program P2WKSS yaitu sesuai kriteria suatu kelurahan yang masih terbelakang atau tertinggal secara fisik yaitu sarana prasarana serta dari sumberdaya manusia yang masih rendah. Adapun cara untuk membantu perkembangan kehidupan masyarakat di kelurahan Kurao Pagang yaitu dengan mengikutsertakan semua OPD pemerintahan Kota Padang untuk melakukan program kegiatannya dalam membenahi ketertinggalan di Kelurahan Kurao Pagang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan melalui penyuluhan-penyuluhan. Bentuk binaan yang telah diterapkan oleh Program P2WKSS ini diantaranya yaitu pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pelatihan pembuatan kerajinan tangan, dan penyuluhan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang. Adapun teori yang sesuai pada penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Menurut Presmann dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi

yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)(Purwanto dan Sulistyastuti, 2015).

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan (Agustino, 2017).

Mengutip dari (Agustino, 2017) Teori Implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III yang dikenal dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* ini memiliki empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila administrator mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas mereka. Setelah memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, selanjutnya dilakukan pengkomunikasian kepada setiap anggota bagian tentang tugas dan tanggung jawab tersebut didalam suatu organisasi. Ada tiga indikator variabel komunikasi, yaitu :

- a. Transmisi, mengkomunikasikan kepada setiap anggota didalam organisasi tentang tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Kejelasan, informasi yang diberikan maupun yang di terima haruslah jelas agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan tanpa kendala.
- c. Konsisten, sangat penting suatu perintah yang dilaksanakan itu konsisten dalam arti tidak mengalami perubahan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana.

### 2. Sumber daya

Adapun yang menjadi indikator dari sumber-sumber daya ini yaitu :

- a. Staf; merupakan sumber daya manusia yang menjadi sumber daya utama dalam implementasi kebijakan.
- b. Informasi; ada dua bentuk informasi dalam implementasi kebijakan yaitu: (i) informasi tentang cara melaksanakan kebijakan. (ii) informasi tentang data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah di tetapkan.
- c. Wewenang; kewenangan yang formal menyebabkan suatu perintah dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Fasilitas; pelaksanaan suatu kebijakan tanpa adanya fasilitas sangat tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena itu sangat penting adanya fasilitas yang memadai baik itu fasilitas fisik maupun fasilitas pendukung.

### 3. Disposisi

Disposisi atau disebut juga dengan sikap dari pelaksana kebijakan. Adapun variabel yang perlu dicermati pada disposisi ini adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana sangat berhubungan dengan bagaimana personil melaksanakan suatu kebijakan dari administrator yang lebih tinggi. Apabila personil tidak melaksanakan suatu perintah sesuai yang ditetapkan maka ini akan menjadi hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi; artinya penunjukan dan pengangkatan staf haruslah sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
- c. Insentif; salah satu yang menjadi motivasi dalam diri seseorang salah satunya yaitu dengan adanya pemberian insentif, pemberian insentif ini juga memberikan kontribusi bagi pelaksana yang menjalankan kegiatannya dengan baik.

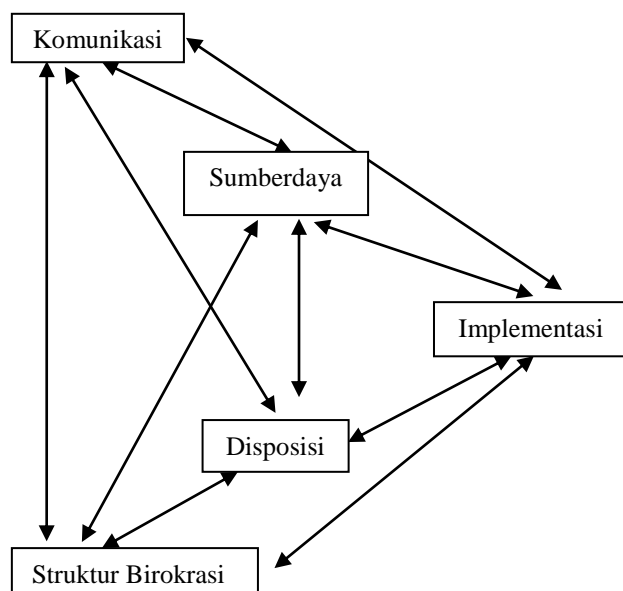
### 4. Struktur birokrasi

Terdapat dua karakteristik, yang mempengaruhi kinerja suatu birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a. Membuat *Standar Operating Procedure (SOPs)* yang lebih fleksibel.

- b. Melaksanakan fragmentasi, artinya sangat penting untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan wewenang tanggung jawab yang telah di tetapkan.

**Gambar 2.2**  
**Model George C. Edward III**



*Sumber: Leo Agustino (2017:142)*

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan khususnya di RW 08 Kelurahan Kurao Pagang. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik sampling insidental dan sampling purposive. Berdasarkan teknik sampling insidental yaitu beberapa warga binaan yang terdapat pada 75 KK yang peneliti temui secara kebetulan ada di lapangan penelitian, sedangkan pada sampling purposive yaitu Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Kasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Ekonomi, Pembina Program P2WKSS dan Ketua Pelaksana Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data diawali dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Program P2WKSS dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kurao Pagang yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kelurahan Kurao Pagang pada dasarnya juga merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki sasaran pada kaum perempuan. Anggota Program

P2WKSS atau yang disebut keluarga binaan program dapat dilihat melalui penomoran rumah yang di buat khusus. Keluarga binaan ini dibatasi 75 Kepala Keluarga (KK) pada RT 01 dan RT 02 RW 08 Kelurahan Kuroo Pagang, Kecamatan Nanggalo yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) Lurah Kuroo Pagang. Kriteria pemilihan keluarga binaan didasarkan pada keluarga yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Bentuk binaan yang telah diterapkan oleh Program P2WKSS ini diantaranya yaitu pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pelatihan pembuatan kerajinan tangan, dan penyuluhan kesehatan.

Peneliti mengambil Kelurahan Kuroo Pagang sebagai tempat penelitian adalah karena secara istimewa Kelurahan Kuroo Pagang tepatnya pada RT 01 dan RT 02 RW 08 mendapat binaan lanjutan sampai 3 tahun yang tidak didapat oleh kelurahan-kelurahan lain.

Untuk melihat Pelaksanaan Program P2WKSS di Kelurahan Kuroo Pagang peneliti menggunakan Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III, ada 4 variabel dalam pendekatan ini yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Implementasi suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila administrator mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas mereka. Setelah memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, selanjutnya dilakukan pengkomunikasian kepada setiap anggota bagian tentang tugas dan tanggung jawab tersebut didalam suatu organisasi. Ada tiga indikator variabel komunikasi, yaitu :

- a. Transmisi, mengkomunikasikan kepada setiap anggota didalam organisasi tentang tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Kejelasan, informasi yang diberikan maupun yang di terima haruslah jelas agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan tanpa kendala.
- c. Konsisten, sangat penting suatu perintah yang dilaksanakan itu konsisten dalam arti tidak mengalami perubahan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana.

Fakta dilapangan dari wawancara yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi yang terlaksana antara sesama pemerintah sudah berjalan dengan baik, komunikasi pemerintah dengan ketua pelaksana juga sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan saling mengkomunikasikan kegiatan melalui surat dan telfon. Selain itu komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat juga sudah terlaksana dengan baik. Terlihat dari ketua pelaksana yang cepat tanggap terhadap informasi dan mengkomunikasikannya langsung ke anggota warga binaan.

### **2. Sumber Daya**

Adapun yang menjadi indikator dari sumber-sumber daya ini yaitu :

- a. Staf; merupakan sumber daya manusia yang menjadi sumber daya utama dalam implementasi kebijakan.
- b. Informasi; ada dua bentuk informasi dalam implementasi kebijakan yaitu: (i) informasi tentang cara melaksanakan kebijakan. (ii) informasi tentang data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah di tetapkan.
- c. Wewenang; kewenangan yang formal menyebabkan suatu perintah dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Fasilitas; pelaksanaan suatu kebijakan tanpa adanya fasilitas sangat tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena itu sangat penting adanya fasilitas yang memadai baik itu fasilitas fisik maupun fasilitas pendukung.

Fakta di lapangan dari wawancara yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia menjadi salah satu kendala dalam mencapai tujuan pelaksanaan Program

P2WKSS yang ditandai dengan kesulitan pemerintah untuk mengajak dan mengubah mindset masyarakat. Selain itu ketidakjelasan dari segi modal dan pemasaran juga menjadi salah satu alasan yang menjadikan warga binaan mengeluhkan tentang manfaat dari program ini.

### 3. Disposisi

Disposisi atau disebut juga dengan sikap dari pelaksana kebijakan. Adapun variabel yang perlu dicermati pada disposisi ini adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana sangat berhubungan dengan bagaimana personil melaksanakan suatu kebijakan dari administrator yang lebih tinggi. Apabila personil tidak melaksanakan suatu perintah sesuai yang ditetapkan maka ini akan menjadi hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi; artinya penunjukan dan pengangkatan staf haruslah sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
- c. Insentif; salah satu yang menjadi motivasi dalam diri seseorang salah satunya yaitu dengan adanya pemberian insentif, pemberian insentif ini juga memberikan kontribusi bagi pelaksana yang menjalankan kegiatannya dengan baik.

Fakta di lapangan berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program P2WKSS oleh pemerintah dan masyarakat sudah terlaksana dengan sikap yang baik. Artinya pemerintah dan masyarakat sudah bersikap baik agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik, yang mempengaruhi kinerja suatu birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a. Membuat *Standar Operating Procedure (SOPs)* yang lebih fleksibel.
- b. Melaksanakan fragmentasi, artinya sangat penting untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan wewenang tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Fakta di lapangan berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan Program P2WKSS yang terlihat dari adanya aturan jelas yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap kegiatan-kegiatan yang di serahi tugas dan tanggung jawab kepada Dinas P3AP2KB, yang kemudian di koordinasikan ke OPD-OPD terkait di Kota Padang dan disampaikan ke warga binaan melalui ketua pelaksana di daerah Program.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang pelaksanaan Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, maka dapat peneliti ambil beberapa kesimpulan, yaitu Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Kurao Pagang Kota Padang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi, Pelaksanaan Program P2WKSS komunikasi dan koordinasi yang terlaksana antara sesama pemerintah sudah berjalan dengan baik, komunikasi pemerintah dengan ketua pelaksana juga sudah terjalin dengan baik. Selain itu komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat juga sudah terlaksana dengan baik.
2. Sumberdaya, Pelaksanaan Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang Kota Padang pada variabel sumberdaya belum terlaksana dengan baik, yang ditandai dengan kesulitan pemerintah untuk mengajak dan mengubah mindset masyarakat. Selain itu ketidakjelasan dari segi modal dan pemasaran juga menjadi salah satu alasan yang menjadikan warga binaan mengeluhkan tentang manfaat dari program.

3. Disposisi, Pelaksanaan Program P2WKSS yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sudah terlaksana dengan sikap yang baik.
4. Struktur Birokrasi, adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan Program P2WKSS yang terlihat dari adanya aturan jelas yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap kegiatan-kegiatan yang di serahi tugas dan tanggung jawab kepada Dinas P3AP2KB, yang kemudian di koordinasikan ke OPD-OPD terkait di Kota Padang dan disampaikan ke warga binaan melalui ketua pelaksana di daerah Program.

Adapun saran peneliti untuk keberhasilan dalam pelaksanaan Program P2WKSS adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas P3AP2KB, perlunya sosialisasi yang dilakukan pemerintah disertai dengan kedekatan emosional sehingga sumber daya dalam arti warga binaan tidak kecewa kepada pemerintah. Pemerintah harus dapat dipercaya oleh warga binaan karena hal ini dinilai juga mempengaruhi motivasi.
2. Bagi Dinas P3AP2KB, untuk kejelasan modal pemerintah lebih baik mendampingi warga binaan sampai terbentuknya koperasi yang di kelola secara mandiri.
3. Bagi Dinas P3AP2KB, untuk pemasaran produk hasil dari pelatihan yang telah di terapkan di Kelurahan Kurao Pagang diharapkan pemerintahlah yang datang ke warga binaan minimal sekali sebulan untuk menagih hasil karya mereka dan membantu langsung memasarkannya, karena jika hanya menunggu warga binaan atau ketua pelaksana melaporkan ke kantor Dinas P3AP2KB akan dinilai tidak ada kejelasan kepada siapa produk akan disampaikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Utama, Agung & Handayani, Titin Hera Widi. 2014. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, *19*, 154–167.